

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang selalu di hadapi negara Indonesia yaitu permasalahan kemiskinan. Kemiskinan dapat di artikan sebagai kondisi di mana tidak hanya terkait hidup yang serba kekurangan dengan tingkat pendapatan yang rendah, tetapi juga dapat di sebabkan oleh beberapa hal lain, seperti tingkat kesehatan yang masih kurang, tingkat pendidikan yang masih rendah, perlakuan tidak adil dalam bidang hukum, rentan terhadap ancaman tindak kriminal, keterbatasan lapangan pekerjaan, lambatnya pertumbuhan ekonomi dan ketidakberdayaannya dalam menentukan hidup masing-masing (Suryawati, 2005). Selain itu, kemiskinan juga di sebabkan dengan melonjaknya penduduk yang mempunyai keterbatasan akan akses terhadap pelayanan dasar, seperti keterbatasan akses modal, sarana produksi, peningkatan kualitas dan kuantitas produk, pemasaran, sanitasi, serta adanya pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal dapat di lihat dengan naik turunnya harga BBM, tarif dan regulasi yang menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Sampai detik ini permasalahan kemiskinan masih selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan merupakan masalah kompleks dan multidimensional sehingga menjadi suatu prioritas

pembangunan di Indonesia. Artinya masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Di lihat dari aspek primer kemiskinan, meliputi miskin terhadap aset, rendahnya partisipasi organisasi sosial dan politik, dan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan jika di lihat dari aspek sekunder kemiskinan, meliputi miskin terhadap jaringan sosial, terbatasnya informasi, serta rendahnya sumber-sumber keuangan.

Indonesia merupakan negara berkembang yang belum terlepas dengan masalah sosial dan ekonomi. Salah satu masalah sosial dan ekonomi terbesar di Indonesia adalah permasalahan kemiskinan. Dapat di lihat bahwa permasalahan kemiskinan tersebar secara massif di berbagai belahan provinsi di Indonesia, yang salah satunya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi DIY termasuk ke dalam kategori 16 provinsi termiskin di Indonesia. Persentase kemiskinan pada bulan September 2021 di DIY yaitu 12,80 persen dan pada bulan Maret 2022 yaitu 11,34 persen. Terdapat penurunan sekitar 1,46 persen pada rentan waktu September 2021 sampai Maret 2022. Namun rata-rata persentase kemiskinan secara nasional sekitar 9,66 persen. Artinya, meskipun di DIY mengalami penurunan kemiskinan, namun persentase kemiskinan di DIY masih berada di atas persentase rata-rata nasional (Badan Pusat Statistik, 2022).

Dalam proses menyelesaikan persoalan kemiskinan, sebenarnya PBB sudah mempunyai formulasi di berbagai belahan dunia dengan menerapkan Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan

suatu program dunia dalam jangka panjang untuk mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap negara. Hal tersebut di buktikan dengan dicantumkannya pengentasan kemiskinan pada tujuan utama dari tujuh belas tujuan SDGs (Irhamisyah, 2019).

Dalam tujuh belas tujuan SDGs, tanpa kemiskinanlah yang menjadi target utamanya, di mana kemiskinan menjadi permasalahan yang sudah mendasar dan menjadi pusat perhatian pemerintah di berbagai negara berkembang, sebab kemiskinan mempunyai dimensi dan tantangan yang luas, baik di tingkat lokal, nasional maupun global. SDGs menegaskan bahwa pentingnya upaya untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan agar di lakukan bersama dengan upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menerapkan langkah kebijakan sosial untuk memenuhi beberapa kebutuhan sosial: seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan lapangan pekerjaan, serta adanya langkah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim serta perlindungan lingkungan sekitar.

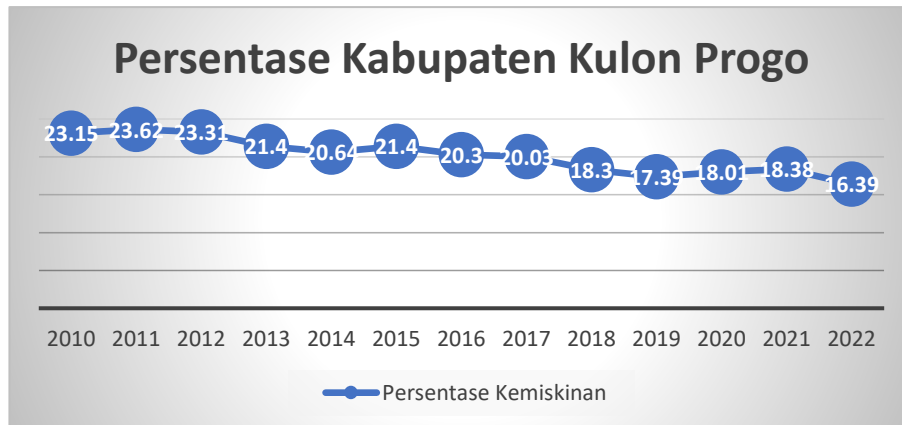
Salah satu implementasi dari SDGs di Indonesia dengan menghadirkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk membantu menurunkan angka kemiskinan. TKPKD adalah tim yang melakukan tugas sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dimasing-masing daerah yang bersangkutan. Di mana TKPKD mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengawasan, mengevaluasi dan memonitoring setiap program yang telah di lakukan sesuai dengan

keputusan tim nasional. Salah satunya provinsi yang menerapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta.

Agar terlaksananya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang maksimal, maka Kabupaten Kulon Progo membentuk Surat Keputusan No. 325 Tahun 2010 tentang Pembentukan TKPKD Kabupaten Kulon Progo dan sekretariatnya yang di lanjutkan dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan TKPK Kecamatan dan Desa/Kelurahan (Sekretaris Daerah Kulon Progo, 2011). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan agar dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tetap sesuai dengan aturan hukum dan peraturan-peraturan lainnya yang ada. (Sekretaris Daerah Kulon Progo, 2015).

Setelah TKPKD berdiri di Kabupaten Kulon Progo, mampu mengatasi masalah kemiskinan di sana selama kurang lebih dua belas tahun. Dibuktikan dengan adanya data persentase yang mulai turun dari tahun 2010 hingga 2022.

Grafik 1. 1 Persentase Kemiskinan



Sumber: BPS Kulon Progo Tahun 2022

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo telah menurun dari tahun 2010 dan 2022, seperti yang terlihat pada tabel di atas. Dalam waktu dua belas tahun TKPKD sudah mampu menjawab persoalan kemiskinan. Tercatat dalam tabel tersebut bahwa angka kemiskinan pada tahun 2010 masih berada di angka yang tinggi yaitu sekitar 23.15 persen, meningkat menjadi 23.62 persen pada tahun 2011, setelah itu mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 23.31 persen, kembali mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 21.40 persen, kembali menurun menjadi 20.64 persen pada tahun 2014, namun kembali naik pada tahun 2015 mencapai 21.40 persen, tahun 2016 menurun sekitar 0.10 persen menjadi 20.30 persen, tahun 2017 kembali menurun sekitar 0,27 menjadi 20.03 persen, pada tahun 2018 menurun dengan cepat sekitar 1.73 persen menjadi 18.30 persen, pada tahun 2019 kembali menurun sekitar 0.92 persen menjadi 17.39 persen, pada tahun 2020 kembali meningkat sekitar 0.62 persen menjadi 18.01 persen, di tahun 2021 meningkat kembali sekitar 0.37 persen menjadi 18.38

persen, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 1.99 persen menjadi 16.39 persen. Dengan data yang tertera di atas bisa dikatakan bahwa dengan dibentuknya TKPKD sudah mampu menjawab tuntas permasalahan kemiskinan di Kulon Progo (Badan Pusat Statistik, 2021).

Untuk menanggulangi kemiskinan agar berjalan secara sinergis dan berkelanjutan, maka harus dilakukan melalui dua sisi secara terpadu, yaitu dari sisi penghidupan masyarakat miskin maupun sisi produksinya. Dalam hal sisi penghidupan masyarakat ini diperlukan upaya-upaya yang secara langsung dapat membantu masyarakat agar mendapatkan penghidupan yang layak, baik dari sisi penjaminan hidup maupun akses terhadap berbagai pelayanan dasar, intervensi untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia dari keluarga miskin juga sangat dibutuhkan untuk memutuskan rantai kemiskinan. Sedangkan dari sisi produksinya, diupayakan agar kelompok yang mempunyai pendapatan rendah dapat berpartisipasi dalam kegiatan produktif (Pemerintah Kulon Progo, 2019).

Dapat diketahui juga bahwasanya angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo masih menjadi angka kemiskinan tertinggi di DIY, dikarenakan kurangnya kontribusi masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan tetapi pemerintah daerah sudah memberikan program yang sesuai dengan kebutuhan dan melakukan intervensi program agar kemiskinannya mampu menurun dan terbebas dari permasalahan tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas akan lebih menarik jika diteliti lebih dalam mengenai strategi dari TKPKD dalam menanggulangi

kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. TKPKD yang sejatinya di bentuk sebagai sebuah ikhtiar pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, dari tahun 2010 sampai tahun 2022 sudah mampu menjawab permasalahan kemiskinan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang mampu menguji bagaimana strategi TKPK pada tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2021-2022 tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan tersebut ke dalam satu pertanyaan, sebagai berikut:

Bagaimana strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan untuk penguatan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Kulon Progo tahun 2021-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dari rumusan masalah tersebut, sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisis strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan untuk penguatan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Kulon Progo tahun 2021-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) terhadap program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan pengetahuan tentang strategi yang dilakukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.
2. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau tolak ukur penelitian berikutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat: hasil penelitian ini dapat sebagai acuan agar lebih berkoordinasi dan saling berkesinambungan antara masyarakat dan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.
2. Bagi pemerintah daerah: hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam segala program yang dirancang pemerintah dan TKPKD untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo
3. Bagi peneliti: hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai keberadaan dan keefektifan TKPKD dalam mengentaskan kemiskinan.

1.5 Literature Review

Penelitian ini jarang di temui berdiri sendiri atau beranjak dari nol. Biasanya suatu penelitian mengacu pada penelitian lain yang dapat di jadikan titik tolak dan daya pembanding dalam penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, peninjauan terhadap penelitian lain sangat penting di karenakan dapat digunakan untuk mengetahui relevansi penelitian yang telah lampau dan penelitian yang akan datang. Adapun penelitian yang di jadikan referensi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Terbit	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fadel M. Azhari Dan Dadang Mashur, 2022	Strategi Pengembangan Usaha Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Pekanbaru	Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan strategi yang di lakukan oleh TKPK dalam menjalankan program kerjanya terutama dalam pengembangan UMKM menjadi daya Percepatan penanggulangan kemiskinan. TKPK sudah berkomitmen untuk menanggulangi kemiskinan bersama stakeholder yang bersangkutan (Azhari, 2022).
2.	Doni Alfisyahrin, 2021	Optimalisasi Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Dalam Perspektif Diskresi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Kota Semarang	Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi secara spesifik terkait peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang selaku <i>leading sector</i> . Dengan adanya TKPKD seharusnya mampu menjawab permasalahan kemiskinan melalui program yang direncanakan untuk menurunkan angka kemiskinan. Kebijakan penanggulangan

			kemiskinan dimulai dari verifikasi database warga miskin, penyusunan program penanggulangan, pelaksanaan program penanggulangan, serta evaluasi dan monitoring hasil pelaksanaan program (Alfisyahrin, 2021).
3.	Paramitha Rakhmawati, Eko Budi Satoto, Ni Nyoman Putu Martini, 2021	Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompetensi Terhadap Kinerja Melalui Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening (Studi kasus: Pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Bappeda Kabupaten Bondowoso)	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan kompetensi pegawai berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi, berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggota TKPK, berpengaruh signifikan terhadap anggota TKPK melalui komitmen organisasi sebagai variabel intervening (Rakhmawati, 2021)
4.	Wahyu Dewi Kesuma dan Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP, 2019	Manajemen Strategi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek	Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini fokus terhadap proses manajemen strategi menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen yang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi, serta pengendalian. TKPKD hadir dengan memperbaiki struktur kelembagaannya dengan meningkatkan SDM agar menjadi anggota yang berkompeten, komitmen dari petugas, berusaha menjadikan GERTAK sebagai program nasional maupun internasional yang mampu menjawab segala bentuk kemiskinan (Kesuma, 2019).
5.	Umi Nurhizat, 2020	Pengembangan Kapasitas Tim	Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan jenis

		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam Implementasi Program Bantuan Non Tunai Di Dinas Sosial Kabupaten Bone	deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas yang di lakukan Pemda kepada TKPKD Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam implementasi program bantuan non tunai di lakukan melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta penguatan koordinasi yang di lakukan dengan mengadakan rapat koordinasi dan melakukan komunikasi dengan sektor lainnya untuk meningkatkan kualitas kinerja (Nurhizat, 2020).
6.	Rina Nurdiana, 2018	Implementasi Program GERTAK Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: TKPKD Kabupaten Trenggalek)	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program GERTAK meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan rasa kesejahteraan sosial. Program GERTAK di laksanakan sesuai rencana, dan berpotensi menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat kurang mampu. Dengan adanya dukungan pedanaan mampu melaksanakan program dengan baik(Nurdiana, 2018).
7.	A. A Ayu Dewi Larantika, 2017	Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Badung	Penelitian ini mendapatkan data melalui observasi dan wawancara dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas tentang Kabupaten Badung yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi, namun angka kemiskinannya dalam kurun waktu 5 tahun tidak mengalami penurunan. Dengan adanya kebijakan, namun tidak mampu menjawab permasalahan maka penelitian ini menghadirkan lima indikator untuk mengukur

			efektivitas implementasi kebijakan, antara lain: ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan sasaran, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses (Larantika, 2017).
8.	Imeylda Agdelia Tarore, 2015	Penanggulangan Kemiskinan Oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kabupaten Sidoarjo Sebagai Upaya Pengurangan Angka Kemiskinan	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas bahwa dengan hadirnya TKPK Kabupaten Sidoarjo dapat membawa perubahan dari bidang fisik maupun ekonomi secara signifikan dan dapat mengurangi angka kemiskinan. Dibuktikan dengan koordinasi antara TKPK dengan SKPD teknis yaitu BPMPKB selaku SKPD teknis program rehab rumah tidak layak huni yang di angkat sebagai contoh oleh peneliti. Selain itu dalam pelaksanaannya TKPK juga berkoordinasi dengan P3M dalam menghimpun saran dan informasi dari masyarakat mengenai masyarakat sasaran yang membutuhkan bantuan program rehab rumah tidak layak huni (Tarore, 2015).
9.	Faikar Aufa, 2015	Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Menggunakan teori demokrasi, good governance, otonomi daerah dan kebijakan percepatan penanggulangan. Sinergitas penelitian ini di lakukan melalui koordinasi dan pengendalian program Satuan Kerja Perangkat Daerah. Namun, antara kedua lembaga tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal, serta belum terpadunya data masyarakat miskin (Aufa, 2015).

10.	T. Mohd. Faisal dan Drs. Erman M, M.Si, 2012	Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2012	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini memuat kebijakan yang dikeluarkan TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penanggulangan kemiskinan menentukan daerah prioritas dan target intervensi pengentasan kemiskinan, Penganggaran menganalisis kemiskinan program penanggulangan kemiskinan, membuat strategi penanggulangan kemiskinan, pemantauan kemiskinan program penanggulangan kemiskinan, dan koordinasi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Percepatan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah telah di lakukan oleh TNP2K adalah perbaikan program perlindungan sosial, peningkatan akses ke dasar pelayanan, pemberdayaan masyarakat miskin, dan menciptakan pembangunan yang inklusif (Faisal, 2012).
-----	--	--	--

Penelitian terdahulu yang relevan sangatlah penting karena dapat di jadikan titik tolak dan daya pembanding dalam penelitian selanjutnya. Begitu pula dengan beberapa penelitian terdahulu di atas yang dapat di jadikan acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian TKPKD. Namun kita perlu ketahui analisis terhadap bagaimana keterkaitan antara penelitian satu dengan penelitian sebelumnya. Pembahasan mengenai TTKPKD pada jurnal maupun artikel serta kajian di atas masih sangat minim karena masih asingnya dengan pemahaman terkait strategi kelembagaan dalam

mengentaskan kemiskinan dari di bentuknya lembaga tersebut sampai detik ini.

Konsekuensi yang harus ditempuh pemerintah dalam penerapan TKPKD adalah dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah harus mengimplementasikan ke sebuah program berkelanjutan. Salah satunya program yang di rancang oleh TKPKD Kabupaten Kulon Progo. TKPKD Kabupaten Kulon Progo telah mendapatkan penghargaan karena melalui program-program yang di laksanakan mampu menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo.

Sudah terdapat beberapa pembahasan kajian inovasi lembaga yang berkaitan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan seperti program Pengembangan Usaha TKPK untuk percepatan penanggulangan kemiskinan (Azhari, 2022) dan strategi yang di lakukan TKPK dalam programnya yaitu Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan (Kesuma, 2019). Kedua jurnal tersebut hanya berfokus kepada satu program untuk mengentaskan kemiskinan bukan terkait strategi yang digunakan TKPKD untuk mengentaskan kemiskinan dari program yang telah di laksanakan serta adanya keberlanjutan dari program yang mampu menurunkan angka kemiskinannya. Walaupun keduanya menjadi tolak ukur dari penulis tetapi keduanya masih minim dalam membahas strategi TKPKD secara menyeluruh untuk mengentaskan kemiskinan.

Maka dari itu, penelitian ini memiliki posisi yang konkrit bahwa pembahasan mengenai strategi TKPKD dengan program yang telah terlaksana mampu menanggulangi kemiskinan masih sangat minim dan juga kajian mengenai program keberlanjutannya yang merupakan salah satu inovasi yang TKPKD ciptakan merupakan hal menarik untuk dibahas. Selain itu, untuk menambah khazanah analisis terkait strategi TKPKD ini mempunyai tujuan, yaitu penelitian ini dapat di jadikan salah satu acuan bagi kalangan akademisi maupun praktisi dalam mengembangkan kajiannya. Dengan adanya penelitian terkait “Strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Untuk Penguatan Sustainable Development Goals Di Kabupaten Kulon Progo Pada Tahun 2021-2022” maka kebaharuan dan argumen penelitian ini memiliki posisi konkrit dalam melanjutkan riset analisis terkait strategi TKPKD dalam program pengentasan kemiskinan yang di jadikan program berkelanjutan.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1. Strategi

1. Definisi Strategi

Kata "strategi" berasal dari kata Yunani "strategos," yang mengacu pada serangkaian tindakan umum yang diambil untuk mengalahkan musuh selama konflik, atau sekelompok senjata yang digunakan untuk melibatkan musuh dalam pertempuran. Jadi istilah strategi awalnya berasal dari kalangan militer dan secara populer

sering di nyatakan sebagai “kiat yang digunakan oleh para jenderal untuk memenangkan peperangan”. Secara umum, strategi adalah pendekatan yang digunakan oleh manajer atau pemimpin senior lainnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Langkah pertama dalam merumuskan kegiatan dengan tetap mempertimbangkan keadaan internal dan eksternal untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan di sebut strategi. Ketiga tahapan manajemen strategi tersebut adalah: perumusan strategi, strategi pelaksanaan, dan evaluasi strategi (Purnomo, 1999).

Untuk menciptakan misi bisnis, perlu adanya identifikasi eksternal berupa peluang dan ancaman. Sedangkan untuk mengidentifikasi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan. Menciptakan tujuan jangka panjang mempengaruhi strategi yang berbeda dan memilih strategi terbaik untuk di laksanakan adalah bagian dari proses pengembangan strategi.

Menurut George Stainner dan John Minner, mengartikan strategi sebagai penempatan misi, penempatan sasaran organisasi, dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal dalam perumusan kebijakan tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan sasaran utama organisasi akan tercapai (Steinner, 2002).

Menurut Quinn dalam (Sukristono, 1992) dalam bukunya mengatakan bahwa strategi terdiri atas tujuan yang akan dicapai, kebijakan untuk memandu kegiatan, dan metode implementasi digunakan sebagai acuan mencapai tujuan. Mewujudkan beberapa konsep dan dorongan yang memberikan hubungan keseimbangan, koneksi dan perhatian. Strategi untuk mengkomunikasikan sesuatu yang tidak dapat diketahui atau diantisipasi. Quinn mendefinisikan strategi sebagai pola atau rencana yang menyatukan tujuan, arahan, dan tindakan penting. Strategi yang baik akan membantu perusahaan dalam meningkatkan sumber daya, seperti bakat internal khusus dan pandangan ke depan terhadap lingkungan dengan cara yang paling efektif.

Secara khusus strategi adalah posisi dari misi perusahaan, penempatan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan kekuatan internal dan eksternal, perumusan kebijakan dan strategi khusus untuk mencapai tujuan, dan memastikan bahwa implementasinya tepat sasaran. Semua tindakan ini dilakukan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran utama organisasi.

2. Bentuk-bentuk Strategi

Menurut (Salusu, 2006) dalam bukunya yang berjudul “Keputusan Stratejik: Organisasi Publik dan Non Profit” menjelaskan

bahwa Kotten membagi bentuk-bentuk strategi menjadi empat bagian, yaitu:

1) Corporate Strategy (Strategi Organisasi)

Dalam strategi organisasi, sebuah strategi dapat dirumuskan melalui visi dan misi, tujuan, dan berbagai inisiatif strategi yang di tuangkan ke dalam suatu program atau kegiatan-kegiatan.

2) Program Strategy (Strategi Program)

Strategi ini berkaitan dengan memberikan perhatian terhadap implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Aspek yang dapat di lihat dalam strategi program ini adalah apakah strategi yang di lakukan oleh organisasi atau instansi akan memberikan dampak positif untuk instansinya sendiri dan masyarakat sebagai penerima program.

3) Resource Support Strategy (Strategi Sumber Daya)

Strategi ini memusatkan perhatian dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Adapun aspek-aspek yang dapat di lihat dari strategi sumber daya ini adalah:

- a. Sarana dan Prasarana, sumber daya yang lebih di kenal sebagai peralatan untuk melancarkan pelaksanaan program dari instansi atau organisasi yang melaksanakan.

- b. Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya ini lebih di kenal sebagai motor penggerak untuk pelaksanaan program dari sebuah instansi atau organisasi.
- c. Sumber Daya Finansial (Anggaran), sumber daya ini di kenal sebagai salah satu faktor yang sangat urgen dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya dukungan finansial dari instansi atau organisasi maka program akan berjalan baik.

4) Institutional Strategy (Strategi Kelembagaan)

Strategi ini lebih di kenal untuk mengukur kekuatan atau kemampuan suatu instansi dalam menghadapi permasalahan yang terletak pada pemanfaatan yang maksimal unsur-unsur kelembagaan berupa SOP yang dimiliki oleh sebuah instansi untuk mendukung pelaksanaan suatu program.

Empat macam strategi ini dapat diterapkan tergantung pada kesempatan dan kondisi yang akan di lakukan. Menurut Kotten, salah satu jenis strategi adalah strategi dukungan sumber daya, dan salah satu sumber daya tersebut melibatkan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan tingkat kinerja bisnis atau organisasi, sumber daya manusia ini harus diperhitungkan dan ditingkatkan (David, 2006).

1.6.2. Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Dalam arti proper, kemiskinan dapat di pahami sebagai keadaan di mana seseorang kekurangan dalam hal keuangan dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan di katakan sebagai suatu fenomena multi face atau multidimensional. Yang artinya masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Di lihat dari aspek primer kemiskinan, meliputi miskin terhadap aset, rendahnya partisipasi organisasi sosial dan politik, dan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan jika di lihat dari aspek sekunder kemiskinan, meliputi miskin terhadap jaringan sosial, terbatasnya informasi, serta rendahnya sumber-sumber keuangan (Nasikun, 2001).

Chambers dalam (Nasikun, 2001) mengklaim bahwa kemiskinan adalah gagasan multifaset dengan lima dimensi, termasuk kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan dalam menghadapi keadaan darurat, ketergantungan, dan keterasingan pada tingkat geografis dan sosiologis.

2. Bentuk Kemiskinan

Hidup dalam kemiskinan bukan dari sekadar tidak memiliki cukup uang atau memiliki pendapatan rendah; Ini juga melibatkan sejumlah faktor lain, termasuk kesehatan yang buruk, pendidikan yang tidak memadai, perlakuan hukum yang tidak setara, berisiko mengalami aktivitas kriminal, tidak berdaya dalam menghadapi penindasan, dan tidak dapat mengendalikan cara hidup seseorang.

(Suryawati, 2005). Kemiskinan dibagi menjadi empat bentuk, sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan absolut, ketika pendapatan seseorang jatuh di bawah garis kemiskinan atau ketika mereka tidak mampu membayar kebutuhan hidup termasuk makanan, pakaian, perawatan kesehatan, perumahan, dan pendidikan untuk hidup dan bekerja.
- 2) Kemiskinan relatif, situasi di mana tidak semua aspek masyarakat telah dipengaruhi oleh program pembangunan, yang mengarah pada ketimpangan pendapatan.
- 3) Kemiskinan kultural, di mana kemiskinan ini di sebabkan oleh sikap masyarakat atau seseorang yang di sebabkan oleh faktor budaya, seperti: enggan untuk berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, faktor kemalasan, pemboros, tidak mempunyai ide atau inovasi padahal mendapatkan bantuan dari pihak luar.
- 4) Kemiskinan struktural, di mana situasi ini di sebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya tingkat kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat di bedakan menjadi dua jenis, yaitu: kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan (artificial) (Mas'Oed, 1997).

- 1) Kemiskinan alamiah, di mana kemiskinan ini berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam, prasarana umum dan keadaan tanah yang tandus.
- 2) Kemiskinan buatan, di mana keadaan ini lebih banyak di akibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

3. Karakteristik Kemiskinan

Ciri-ciri penduduk miskin (Salim, 1980), antara lain:

- 1) Rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri (misal: tanah, modal, peralatan kerja dan keterampilan).
- 2) Mempunyai tingkat pendidikan yang rendah.
- 3) Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau bahkan menganggur.
- 4) Kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (slum area).
- 5) Kurangnya kesempatan untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, sanitasi, pendidikan, angkutan, fasilitas komunikasi dan kesejahteraan sosial lainnya.

Selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki menurut (Suryawati, 2005), sebagai berikut:

- 1) *Natural assest*, seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.
- 2) *Humman assest*, terkait kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan.
- 3) *Physical assest*, minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum.
- 4) *Financial assest*, akses untuk memperoleh modal.
- 5) *Social assest*, adanya jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan bargaining position dalam pengambilan segala keputusan politik.

1.6.3. Sustainable Development Goals/SDGs

1. Definisi SDGs

SDGs adalah rencana aksi untuk manusia, lingkungan, kemakmuran, dan perdamaian dunia yang menyediakan agenda global untuk pembangunan berkelanjutan pada tiga dimensi: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Maksud dan tujuan SDGs bersifat global, dapat diterapkan secara universal, terintegrasi dan komprehensif serta menghormati kebijakan dan prioritas masing-masing negara dengan

mempertimbangkan kapasitas dan tingkat perkembangannya yang bervariasi.

2. Tujuan SDGs

Demi mencapai tiga tujuan mulia berupa pengentasan kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim, SDGs hadir dengan membawa 17 tujuan yang harus dicapai menurut (Irhamsyah, 2019), diantaranya yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan.
- 2) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan bidang pertanian berkelanjutan.
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk seluruh asia.
- 4) Memastikan standar pendidikan yang komprehensif dan memperluas peluang untuk pembelajaran seumur hidup untuk seluruh pennduduk asia.
- 5) Melakukan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
- 6) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.
- 7) Untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki akses energi yang modern, ekonomis dan berkelanjutan.
- 8) Untuk mendorong lapangan pekerjaan yang produktif dan komprehensi, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan, serta untuk menemukan pekerjaan yang layak dan baik.

- 9) Mengembangkan infrastruktur yang tangguh mendukung industri yang inklusif, berkelanjutan dan memajukan teknologi yang mutakhir.
- 10) Untuk mengurangi kesenjangan sosial baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 11) Menciptakan kota dan komunitas yang inklusif, aman, kuat dan berkelanjutan.
- 12) Menjamin produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- 13) Melakukan tindakan dan mampu mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
- 14) Untuk melindungi sumber daya kelautan dan memanfaatkannya secara berkelanjutan.
- 15) Untuk mempertahankan, merotasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
- 16) Untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan, membangun kelembagaan yang efektif, dan akuntabel.
- 17) Untuk menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

3. Pilar-Pilar SDGs

Konsep utama dalam (Alisjahbana, 2017) tersebut melahirkan turunan yang bisa dimaknai sebagai pilar pertama dari SDGs yakni disebut dengan 5P (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership). Pilar 5P ini dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) *People*: SDGs ini didirikan dengan maksud untuk menegaskan kembali bahwa semua orang harus bebas dari rantai kemiskinan dan kelaparan, mencapai kesetaraan, dan memiliki hak untuk hidup bermartabat.
- 2) *Planet*: SDGs bertujuan untuk melindungi bumi ini dari efek negatif aktivitas manusia, seperti perubahan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam secara ekstensif, untuk terus memenuhi persyaratan saat ini dan masa depan.
- 3) *Prosperity*: SDGs hadir untuk memastikan kesejahteraan hidup semua umat manusia, mampu mencukupi kebutuhannya serta dapat hidup secara harmonis berdampingan dengan alam.
- 4) *Peace*: dengan cara yang sama bahwa pembangunan berkelanjutan tidak mungkin dicapai tanpa jaminan sosial dan perdamaian, yang terjadi adalah sebaliknya.
- 5) *Partnership*: Satu-satunya cara untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan berhasil dalam skala global adalah dengan memiliki kerja sama internasional yang kuat yang didasarkan dengan adanya solidaritas.

1.6.4. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (Admin Hukum Setda, 2015).

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Pemerintah Dearah menerapkan beberapa asas menurut (Susmayanti, 2012), yaitu:

- 1) Asas Otonomi, merupakan prinsip pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 7 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 2) Desentralisasi, di mana Pemerintah Pusat mengalihkan urusan pemerintahan ke daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- 3) Dekonsentrasi, sebagian tanggung jawab Pemerintah Pusat atas urusan pemerintahan telah di alihkan kepada Gubernur sebagai perwakilan dari Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di beberapa daerah atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang bertanggung jawab atas semua urusan pemerintahan umum.
- 4) Tugas Pembantuan, penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang merupakan kewenanga daerah provinsi. Atau,

penugasan dari pemerintah pusat ke daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.

- 5) Daerah Otonom yang selanjutnya di sebut sebagai unit masyarakat hukum dengan batas teritorial, suatu wilayah memiliki kekuatan untuk mengontrol dan mengelola urusan pemerinatahan serta kepentingan penduduk setempat.

Untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah mengatur dirinya sendiri, atau dapat mengalokasikan sebagian dari mereka untuk pemerintah daerah atau daerah, pemerintah desa, atau perwakilan pemerintah. Selain itu, pemerintah dapat mengatur beberapa urusan pemerintahan sendiri, mendelegasikan sebagian dari mereka kepada gubernur yang bertindak sebagai perwakilannya, atau menugaskan sebagian dari mereka kepada pemerintah daerah atau desa berdasarkan prinsip tugas bantuan (Sunarno, 2008).

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tertulis dalam (Setiawan, 2014), bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: kepastian hukum;

tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1. Strategi, adalah pendekatan yang mencakup semua baik dari penerapan konsep, pembuatan rencana, dan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan peluang dan ancaman dalam jangka waktu tertentu, dengan fokus pada tujuan jangka panjang. Dapat di katakan sebagai rencana kerja yang mengoptimalkan kekuasaan yang mampu mengaitkan pada tujuan dan sasaran organisasi dengan tujuan dan sumber dayanya.

1.7.2. Kemiskinan, merupakan keadaan di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

1.7.3. SDGs, merupakan rencana aksi untuk manusia, bumi, kemakmuran, dan perdamaian dunia yang merupakan agenda pembangunan berkelanjutan pada tiga dimensi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

1.7.4. Pemerintah Daerah, merupakan suatu penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemda dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

1.8 Definisi operasional

Definisi operasional merupakan cara mengartikan variabel secara operasional menurut karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti dapat melakukan observasi atau pengamatan secara rinci terhadap suatu objek. Proses mengartikan variabel berarti menggambarkan variabel sedemikian rupa hingga variabel tersebut hanya memiliki satu makna. Jika sampai variabel tersebut memiliki makna ganda maka akan membuat variabel tersebut bias dan berpengaruh pada penelitian yang ada (Nurdin, I. dan Hartati, 2019).

Menurut (Salusu, 2006) dalam bukunya yang berjudul “Keputusan Strategik: Organisasi Publik dan Non Profit” menjelaskan bahwa Kotten memberikan empat bagian dari bentuk-bentuk strategi, sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Tujuan, Variabel dan Indikator Penelitian

Tujuan	Variabel	Indikator
Untuk mengetahui dan menganalisis strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan untuk penguatan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Kulon Progo tahun 2021-2022.	Corporate strategy	Perumusan visi dan misi
		Perumusan tujuan
		Perumusan strategi yang dituangkan ke dalam program
	Program strategy	Fokus terhadap keterlibatan strategi
		Dampak untuk instansi dan masyarakat
	Recourse support strategy	Sumber Daya Manusia
		Sarana dan Prasarana
		Finansial
	Institusional strategy	Mengembangkan kemampuan/kekuatan organisasi untuk menghadapi permasalahan
		Pembuatan SOP

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan berpikir deskriptif. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penggunaan metode penelitian kualitatif dikarenakan dalam mengatasi permasalahan yang dibutuhkan data secara langsung yang berkaitan. Creswell menjelaskan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk memahami suatu gejala sentral (Raco, 2018). Penelitian kualitatif ini mempunyai tujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas terhadap permasalahan yang ada, menjelaskan keadaan terkait dengan grounded theory, dan lebih memahami pengembangan akan suatu fenomena yang ada (Gunawan, 2013). Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dalam penguatan Sustainable Development Goals di Kabupaten Kulon Progo.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo dikarenakan lembaga inilah yang berkepentingan atau berperan penting dalam penanganan kemiskinan di

Kabupaten Kulon Progo dengan menrumuskan dan melaksanakan kebijakan atau program pengentasan kemiskinan. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo terletak di Kantor Bappeda Kabupaten Kulon Progo di Jl. Perwakilan No.01, Terbah, Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55611.

1.9.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber utamanya, dikumpulkan melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Dalam penelitian ini data primer di peroleh melalui wawancara kepada Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bappeda Kulon Progo, Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan/Perencanaan Ahli Muda Pada Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bappeda Kulon Progo, Staff Kelompok Substansi Kesejahteraan Pada Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bappeda Kulon Progo, Masyarakat desa dengan angka miskin tinggi, yaitu Desa Purwoharjo, Masyarakat desa dengan angka kemiskinan rendah, yaitu Desa Temon Kulon.

Tabel 1. 3 Sumber Data Wawancara

No.	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kulon Progo	Wawancara
2.	Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat/Perencana Ahli Muda Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kulon Progo	Wawancara
3.	Staff Kelompok Substansi Kesejahteraan Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kulon Progo	Wawancara
3.	Masyarakat desa dengan jumlah angka kemiskinan tinggi, yaitu Desa Purwoharjo	Wawancara
4.	Masyarakat desa dengan jumlah angka kemiskinan rendah, yaitu Desa Temon Kulon	Wawancara

2. Data sekunder

Data sekunder digunakan untuk menekankan pada sumber data yang ada dengan menghasilkan data baru. Sehingga, penulis dapat mengeksplorasi data dari sudut pandang yang berbeda dengan melakukan verifikasi, sanggahan, dan penyempurnaan. Data sekunder akan digunakan untuk memperjelas masalah penelitian berdasarkan pada pengalaman yang serupa dengan penelitian. Data sekunder bisa dikatakan sebagai data pendukung yang dikumpulkan dari beberapa literatur seperti jurnal tentang strategi dan TKPKD di berbagai daerah, dokumentasi berupa (RPJMD, RPKD, SPKD), website

kulonprogokab.go.id dan dokumen terkait monitoring evaluasi program TKPKD berupa LP2KD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022.

1.9.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi terkait dengan data-data yang diperlukan. Pengumpulan data nantinya akan membantu untuk melakukan analisis dan akurasi dari penelitian. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer yang nantinya di peroleh dari beberapa narasumber di Bappeda Kulon Progo khususnya Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kulo Progo, Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat/Perencana Ahli Muda Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kulon Progo, Staff Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kulon Progo, Masyarakat desa dengan angka miskin tinggi, yaitu Desa Purwoharjo, Masyarakat desa dengan angka kemiskinan rendah, yaitu Desa Temon Kulon. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini menurut (Yusuf, 2014), adalah:

1. Observasi

Pada penelitian ini, langkah awal teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis adalah observasi. Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau suatu kejadian. Jadi dapat disimpulkan data dengan melakukan

penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan TKPKD. Observasi dilakukan dalam penelitian ini dengan berkunjung atau datang langsung ke lokasi penelitian tempat penulis meneliti. Yang dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 1.1 Lingkungan TKPKD Kabupaten Kulon Progo



Sumber: Observasi Penulis

Gambar di atas menjelaskan bahwa penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap lingkungan TKPKD. Pada saat penulis melakukan observasi, di mana juga bertepatan dengan acara TKPK Award Kabupaten Kulon Progo yang dihadiri oleh OPD terkait, TKPKD Kecamatan, Desa/Kelurahan dan juga adapun masyarakat sekitar yang ikut serta dalam acara tersebut. Acara tersebut dilakukan guna meningkatkan semangat OPD dan TKPKD lainnya agar mampu bekerja sama untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi secara langsung. Dapat pula dikatakan sebagai percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Sehingga, nanti peneliti telah menyusun poin besar pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber untuk dijawab. Hal ini dilakukan agar penulis dapat menggali lebih banyak informasi dari responden sehingga data yang didapatkan lebih akurat. Mekanisme yang digunakan untuk wawancara pada penelitian ini yaitu dengan mengajukan surat persetujuan wawancara, kemudian melakukan wawancara secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara runtut kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kulon Progo, Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat/Perencana Ahli Muda Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kulon Progo, Staff Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kulon Progo, Salah satu desa dengan angka miskin tinggi, yaitu Desa

Purwoharjo, serta masyarakat desa dengan angka kemiskinan rendah, yaitu Desa Temon Kulon.

Tabel 1. 4 Sumber Wawancara

No.	Instansi	Jabatan	Nama
1.	Kantor Bappeda Kabupaten Kulon Progo	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kulon Progo	Restu Dewandaru S.E., M.M
		Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat/Perencana Ahli Muda Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kulon Progo	Fidiastuti, SKM., MM
		Staff Kelompok Kesejahteraan Rakyat Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kulon Progo	Indra dan Bowo
2.	Masyarakat	Masyarakat desa dengan jumlah angka kemiskinan tinggi, yaitu Desa Purwoharjo	Nuryanti dan Rubiyanto
		Masyarakat desa dengan jumlah angka kemiskinan rendah, yaitu Desa Temon Kulon	Suwartini dan Eni Astuti

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna bagi penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berupa bentuk teks tertulis,

artefacts, gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan (life histories), biografi, karya tulis, dan cerita. Dalam penelitian ini, literature review sebagai acuan penelitian, arsip yang digunakan dapat berasal dari arsip data TKPKD Kabupaten Kulon Progo, individu dalam tulisan ataupun gambar dari seseorang. Kemudian, dokumentasi yang telah dikumpulkan nantinya akan diolah lebih lanjut untuk menjadi data pendukung pada penelitian ini.

1.9.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan untuk menyatukan hasil dari pengumpulan data yang kemudian dilakukan reduksi data, penyajian, dan mengambil kesimpulan penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data menjadi hal utama instrument untuk melihat objektivitas suatu data. Analisis data dalam hal ini merupakan proses untuk menemukan dan Menyusun hasil wawancara, catatan yang di peroleh dalam lapangan ataupun dari berbagai sumber yang selanjutnya akan diakumulasikan untuk mengkonstruksi menjadi informasi yang penting (Rijali, 2019). Adapun Langkah dalam analisis data ini yakni:

1. Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data ini keseluruhan data yang di lakukan oleh penulis dari observasi, wawancara, dan dokumentasi di laksanakan dengan turun ke lapangan secara langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis di Kantor Bappeda

Kabupaten Kulon Progo.

2. Reduksi Data

Saat melakukan pengumpulan data akan di peroleh data yang sangat banyak, sehingga perlu pencatatan secara rinci dan teliti. Peneliti akan mereduksi data (merangkum), memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting kemudian mencari pola dan temanya. Pada saat mereduksi data, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai sehingga tujuan utamanya adalah pada temuan.

3. Penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah peneliti selanjutnya akan menyajikan data dalam bentuk table, grafik, pie chard, pictogram dan lain- lain. Dengan adanya penyajian, maka akan terbentuk pola hubungan. Setelah menemukan pola hubungan maka dianalisis secara mendalam.

4. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya setelah di lakukan penyajian data, maka kegiatan akhir adalah menyimpulkan dan melakukan uji verifikasi yang dimaksudkan dengan pengecekan data-data yang telah ditampilkan apakah memenuhi standar keabsahan data atau tidak. Dalam kegiatan penelitian yang di lakukan ini maka nantinya dari tiga analisis tersebut akan di lakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Setelah itu akan didapatkan kesimpulan sementara dan kemudian akan dipadukan dengan temuan di lapangan. Dengan melakukan proses

tersebut maka data yang di peroleh dari lapangan dapat lebih valid dan terjamin (Sugiyono, 2016).